

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pergantian orde baru ke orde reformasi pada tahun 1998 menuntut pelaksanaan otonomi daerah (otda) untuk memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Hal ini secara kongkrit dituangkan dalam Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU tersebut mengisyaratkan bahwa otoda diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Menurut Halim (2007: 328) Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Halim menegaskan bahwa tujuan otoda adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakan prakarsa dan peran serta masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara nyata, optimal, terpadu dan dinamis, serta bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan terhadap daerah dengan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal atau daerah.

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yakni bagaimana pemerintah daerah menggali sumber atau potensi yang dimiliki menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Sumber keuangan daerah menurut UU No.33 tahun 2004 berasal dari PAD, Dana Pertimbangan, Pinjaman Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

PAD merupakan sumber keuangan terbesar dalam pelaksanaan otonomi daerah dan merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. PAD juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, dan dikelompokkan menjadi empat jenis pendapatan yakni: 1) Pajak Daerah, 2) Retribusi Daerah, 3) Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, 4) Lain-lain PAD yang sah.

Hal ini berarti penyelenggaraan otda menuntut adanya kesiapan sumber daya dan sumber dana sebagai konsekwensi adanya otda. Untuk membiayai kegiatan pembangunan setiap kabupaten maupun kota, pemerintahan Daerah (Pemda) tidak saja mengandalkan dana perimbangan, serta pendapatan lain-lain tetapi di biayai dari PAD sehingga Pemda melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dituntut untuk dapat menggali potensi yang merupakan sumber keuangan daerah.

Menurut Halim (2007: 262) ciri utama suatu daerah adalah daerah otonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya dengan proporsi tingkat ketergantungan yang semakin kecil

terhadap pemerintah pusat. Dijelaskan lebih lanjut bahwa kemandirian keuangan suatu daerah dapat diketahui dari rasio kemandirian yang menunjukkan besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan dari pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah.

Secara geografis Propinsi Nusa Tenggara Timur merupakan daerah kepulauan yang dibagi menjadi 4 daratan yaitu : Daratan Flores, Daratan Timor, Daratan Sumba dan Daratan Alor. Terbaginya daerah dalam beberapa Kabupaten dan Kota berimplikasi pada aspek penting Pemerintah Daerah dalam hal keuangan, kebijakan dan pelayanan publik, perencanaan pembangunan maupun investasi pemerintah. Jenis pemerintahanpun terdiri dari pemerintah Propinsi, Kabupaten, Kota dan Desa. Khusus untuk dua pemerintahan yang selevel yakni Kabupaten dan Kota terdapat perbedaan karakteristik yang dapat dibedakan dalam beberapa aspek yakni luas wilayah, kependudukan, mata pencarian penduduk, struktur pemerintahan, sosial budaya dan perekonomian.

Dalam penelitian ini penulis berkonsentrasi pada kondisi PAD Kabupaten/Kota Se Daratan Timor Tahun Anggaran 2009-2011 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

**Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota
Se- Daratan Timor Tahun 2009- 2011**

NO	KABUPATEN/ KOTA	TOTAL PAD		
		TA 2009 (Rp)	TA 2010 (Rp)	TA2011 (Rp)
1	KAB. KUPANG	24.832.201.395,83	31.096.115.135,29	34.391.662.228,20
2	KAB. TTS	15.615.391.422,00	18.418.112.644,61	25.923.443.647,64
3	KAB. TTU	14.996.262.303,90	13.263.448.270,47	13.727.580.381,99
4	KAB. BELU	22.095.998.629,00	33.447.006.092,66	34.802.681.366,00
5	KOTA KUPANG	36.204.733.167,02	36.828.891.454,00	47.702.927.427,60

Sumber : Statistik Keuangan Daerah, Biro Keuangan Setda Prov.NTT

Menurut Bastian (2006) Kabupaten – kabupaten yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bawah Rp. 15 Miliar dianggap sebagai kabupaten rawan kehancuran di era otonomi daerah. Untuk dapat bertahan hidup di era otonomi, setiap Pemerintah Daerah harus kuat secara ekonomis dan umumnya memiliki PAD setidaknya Rp. 25 miliar sampai 30 miliar setahun.

Dari tabel di atas dapat dilihat kemampuan masing-masing daerah menjadi suatu daerah otonom. Perbedaan besarnya jumlah Pendapatan Asli Daerah pada 5 Kabupaten/Kota se-daratan Timor untuk tiga Tahun Anggaran (tahun 2009-2011) ini, di mana Kota Kupang memiliki PAD lebih besar dari kabupaten yang lain.

Berdasarkan Kondisi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Perbandingan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota se-Daratan Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur“.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana perbandingan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota se-Daratan Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Perbandingan Pendapatan Asli Daerah antara Kabupaten/Kota se-Daratan Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perbandingan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota se Daratan Timor, sehingga Kabupaten yang Pendapatan Asli Daerahnya rendah dapat berupaya untuk meningkatkannya .
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lanjutan pada bidang ini.